KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

RESOR TUBAN



-

RENCANA KERJA

KEPOLISIAN RESOR TUBAN

TA. 2022

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

NOMOR : KEP/ 25 /VI/2021, TANGGAL 4 JUNI 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

RESOR TUBAN

-

-

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

Nomor : Kep/ 25 /VI/2021

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

T.A. 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka usulan pagu Indikatif Anggaran Kepolisian Resor Tuban T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Nagara Republik Indonesia;
7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.2.644395/2021 tanggal 5 Desember 2020 tentang Surat Pengesahan DIPA Polres Tuban T.A. 2021;

9. Surat.....

1. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2014 tanggal 25 JUNI 2014 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2015;
2. Keputusan Kapolres Tuban nomor : Kep/ /II/2021, tanggal JUNI 2021, tentang Rencana Strategi Polres Tuban Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan perubahan Kebijakan dari Pemerintah dan atau pimpinan Polri;

1. Peraturan Bupati Tuban Nomor : tentang Rencana Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rencana Kerja Kepolisian Resor Tuban T.A. 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Polres Tuban Tahun 2022;

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 4 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN



RURUH WICAKSONO, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78090891

**DAFTAR ISI**

[**I.** **LATAR BELAKANG 24**](#_Toc63341760)

[1. Kondisi Umum. 24](#_Toc63341761)

[a. perkembangan aspek kehidupan: 25](#_Toc63341762)

[b. Analisis 41](#_Toc63341763)

[2. Identifikasi masalah. 44](#_Toc63341764)

[**II.** **TUJUAN DAN SASARAN 45**](#_Toc63341765)

[3. Visi dan Misi 45](#_Toc63341766)

[a. Visi dan Misi Polda Jatim 45](#_Toc63341767)

[b. Visi dan Misi Polres Tuban 45](#_Toc63341768)

[4. Tujuan Jangka Menengah 46](#_Toc63341769)

[a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jatim 46](#_Toc63341770)

[b. Tujuan Jangka Menengah Polres Tuban 46](#_Toc63341771)

[5. Sasaran Prioritas 47](#_Toc63341772)

[a. Sasaran Prioritas Polda Jatim 47](#_Toc63341773)

[b. Sasaran prioritas Polres Tuban 47](#_Toc63341774)

[**III.** **ARAH KEBIJAKAN POLDA JATIM DAN POLRES TUBAN 47**](#_Toc63341775)

[6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2022. 27](#_Toc63341776)

[7. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tuban Tahun 2022 33](#_Toc63341777)

[**IV.** **PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF 39**](#_Toc63341778)

[8. Program dan kegiatan 39](#_Toc63341779)

[9. Usulan Pagu Indikatif 42](#_Toc63341780)

RENCANA KERJA

KEPOLISIAN RESOR TUBAN TA. 2022

**BAB I**

**LATAR BELAKANG**

1. **Kondisi Umum.**

Pada Tahun 2022 merupakan tahun ketiga perjalanan Renstra Polres Tuban Tahun 2020-2024 yang memasuki pada tahap IV (excellent). Polres Tuban merupakan salah satu lembaga Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun program pembangunan baik jangka menengah (Renstra) maupun program tahunan (Renja). Penyusunan dokumen program pembangunan tersebut dilakukan secara bottom-up melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan Satfung dan Polsek jajaran Polres Tuban. Implementasi monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Polri dan Zone Integritas dan pengukuran kinerja dengan menggunakan instrumen Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK).

Hal tersebut diharapkan dapat membawa Polres Tuban mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya situasi kamtibmas wilayah Kab. Tuban yang aman dan kondusif”, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan asistensi dan supervisi untuk mengetahui hambatannya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan dan memastikan program tetap berjalan dan mencapai target.

Dalam reformasi birokrasi, pelayanan publik dijajaran Polres Tuban telah memperoleh penilaian dari Kemenpan RB dengan predikat WBK.

Dibidang operasional, Polres Tuban telah berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan antara lain Narkoba, Ilegal Logging, dan kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat, antara lain Curat, Curas dan Curanmor. Keberhasilan pengungkapan kasus yang menjadi atensi dunia adalah terorisme di daerah hukum Polres Tuban. Telah ditangkap dengan menyisir diseluruh wilayah Kab. Tuban, sehingga masyarakat semakin percaya dengan kondisi keamanan di Kab. Tuban, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kab. Tuban dan para Investor yang berminat untuk bekerja sama di Wilayah Kab. Tuban sehingga dapat mendongkrak perekonomian Kab. Tuban.

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan operasi Kepolisian yang digelar Tahun 2021 yaitu operasi Kepolisian terpusat, operasi Kepolisian kendali pusat dan operasi Kepolisian mandiri kewilayahan serta penggelaran kesiapan operasional Polres Tuban dan jajaran. Hal ini telah dapat menciptakan situasi aman dan tertib serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranan Polres Tuban.

Kondisi internal dan eksternal Polres Tuban masih dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta kehidupan masyarakat daerah Kab. Tuban tersebut, akan dianalisa sebagai berikut :

1. **perkembangan aspek kehidupan :**
2. Regional Jawa Timur

Kondisi geografi wilayah Jawa Timur, sebelah utara berbatasan laut Jawa, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur selat Bali dan sebelah barat Propinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk ± 38.363.195 jiwa dan sumber daya alam berupa aneka tambang dan hasil hutan, perikanan laut merupakan faktor - faktor yang dapat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

1. Geografi.

Wilayah Jawa Timur bagian tengah dan selatan merupakan daerah pegunungan serta pantai yang curam dari Pacitan-Banyuwangi , bagian utara merupakan kawasan pantai(pantura dari Tuban-Banyuwangi) dan sebagian pegunungan kapur (Tuban-Gresik), gunung berapi yang masih aktif (Gunung Semeru, Arjuno, Welirang, Kelud, Raung, dan Bromo), sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya gempa vulkanik dan tanah longsor akibat hutan yang kritis/gundul maupun gempa tektonis yang berpotensi terjadi gelombang tsunami di pantai selatan yang berada pada garis lempeng Austroneia, serta banjir akibat meluapnya Sungai Brantas atau Bengawan Solo, konflik antar

 nelayan.....

nelayan di peairan laut Jawa,sebagai daerah transit atau perlintasan imigran gelap ke Australia maupun lintasan pelaku kejahatan antar kota/propinsi.

1. Demografi.

Perkembangan penduduk wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan pada setiap tahun, baik karena kelahiran maupun masuknya orang- orang dari luar Jawa Timur (Urbanisasi), sehingga terjadi kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan/industri yang berekses timbulnya masyarakat penyandang masalah sosial sebagai akibat dari lapangan kerja yang sempit, sehingga timbul pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas.

1. Sumber Daya Alam.

Jawa Timur merupakan kawasan yang subur, baik dibawah permukaan bumi (tambang) maupun dipermukaan bumi (hasil perkebunan dan pertanian), namun sumber daya alam yang bersifat strategis (tambang migas, mangan, timah, emas) belum dikelola dengan maksimal, kecuali migas yang telah dikelola ”Asing” dengan sistem ”Kerjasama”, kondisi ini disebabkan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia/un-skill, dan sarana/prasarana yang tersedia terbatas sehingga berakibat timbulnya potensi konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (tambang emas di Tumpangpitu, Banyuwangi), exsplorasi migas (MCL di Tuban, Wilayah Madura). Pengeloaan lingkungan hidup belum berwawasan lingkungan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup, bencana alam, banjir, kekeringan dan ekosistem, kondisi ini dipengaruhi juga dampak dari implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah setempat dengan dalih peningkatan PAD maka pemberian rekomendasi proses perijinan

 Eksplorasi.....

eksplorasi/ekploitasi SDA khususnya tambang sangat mudah prosesnya dan mengabaikan kelestarian lingkungan sehingga terjadi kerusakan terhadap lingkungan yang dapat berdampak terjadinya bencana alam, munculnya kontroversi dari aktivis tambang, dan kesehatan namun disisi lain aktivitas pertambangan tersebut memiliki manfaat yang besar dari sisi perekonomian dan pembangunan.

1. Aspek Ideologi

Bangsa Indonesia sudah bertekad bahwa 4 pilar kebangsaan (Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) adalah “harga mati” bagi bangsa Indonesia, namun masih terdapat kelompok/individu yang ingin dan selalu berupaya menggantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan membentuk organisasi massa atau Parpol dan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, dialog, lokakarya, aksi unras, kegiatan agama (pengajian) serta memasukkan jaringannya di lembaga eksekutif dan legislatif :

* + - 1. kelompok Radikal JAT, JAS, JAD dan HTI berupaya mengganti Pancasila dengan Ideologi agama Islam. Keduanya menggunakan Agama Islam melalui kegiatan pengajian dengan isi khutbah mempengaruhi jama’ah yang hadir. Kelompok JAT yang telah pecah dengan membentuk Jama’ah Anshoud Syari’ah (JAS) dipimpin ACMAD AKHWAN, disamping melalui kegiatan pengajian yang dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk rekruitmen pelaku teror dan melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sebagai jalan Fa’i guna membiayai kegiatan teror. Daerah penyebaran JAT/JAS sudah merata di seluruh Jawa Timur, khususnya Magetan, Madiun, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Banyuwangi yang cenderung menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya yaitu

 terbentuknya.....

terbentuknya Syariat Islam/Khilafah Islamiyah. Sedangkan Kelompok HTI dalam mempengaruhi jama’ah melalui kegiatan agama/pengajian, seminar, dan melakukan demo dengan memanfaatkan hari-hari besar Islam, dan sebarkan leaflet di masjid-masjid umum dan daerah penyebaran HTI meliputi seluruh Jawa Timur;

* + - 1. sejarah Jawa Timur terdapat daerah eks konflik ideologi yaitu Madiun, Blitar dan Banyuwangi, anak-anak keturunan eks-PKI dan simpatisannya membentuk ormas PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) 1965, LPKP 1965 (Lembaga Penelitian Korban Pembunuhan 1965), Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang disertai pembentukan organisasi dibawahnya (underbow) dari kalangan buruh, mahasiswa, Kepala Desa (Parade Nusantara) berupaya untuk menghidupkan kembali faham komunis dengan menuntut pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996 dan menyebarkan faham Neo–Komunisme, melalui berbagai kegiatan seminar, lokakarya, orasi pada saat unras dengan menyusup ke kelompok buruh, mahasiswa dan masyarakat pinggiran. Kelompok ini tiap tahun mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil (<50 orang).

Pada tahun 2010 pertemuan di Banyuwangi dihadiri dr. Ribkaciptaning dan Rieke Diyah Pitaloka namun dibubarkan oleh FPI, di Srengat kab.Blitar dipimpin oleh Sdri. Mutmainah (Tokoh Gerwani) dan pada tanggal 22 Desember 2013, di rumah sdr. Suwarno alm/Ny. Mujayana Dsn. Ngepeh, Ds. Rejoangung, kec.Ngoro, Kab Jombang, diadakan pertemuan dengan dihadiri Ketua YPKP 1965 Sdr. Bejo Untung, Nursabani, S.H. (Aktifis HAM/Pengacara), aktifis HAM AS Mrs. Saskia, LBH NU Sdr. Aan Anshori, serta 40 orang anak-anak keturunan eks PKI dan pemutaran film “SENYAP” yang bertujuan untuk membangun opini publik masyarakat, bahwa peristiwa G30S/PKL adalah merupakan pelanggaran HAM. e) Aspek....

1. Aspek Politik.
2. perkembangan politik lokal Jawa Timur tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan situasi politik Global, Nasional maupun lokal Jawa Timur, yang menekankan prinsip–prinsip Demokrasi dan HAM, keadilan dan penegakan hukum disertai perkembangan pesat di bidang tehnologi Informasi dan komunikasi;

1. konflik internal Parpol (PPP, P.Golkar dan PDIP) yang terjadi pasca Pemilu 2019 diperkirakan akan tetap berlanjut sampai tahun 2020 karena masing-masing pihak mempertahankan ego yang berpengaruh terhadap situasi politik terutama pada saat agenda politik internal Parpol;
2. mekanisme pemilihan pengurus DPC Parpol berdasarkan rekomendasi dari pengurus PAC dan DPD/DPW namun keputusan dari Ketua Umum Parpol berseberangan sehingga rawan terjadinya ketidakpuasan dari pengurus PAC dan DPD/DPW yang melakukan aksi mosi tidak percaya, aksi unjuk rasa dan gesekan antar pendukung;
3. peringatan hari-hari besar nasional maupun internasional (hari korupsi, HAM, Buruh) dan kunjungan kerja Presiden RI ataui Wakil Presiden RI akan selalu dimanfaatkan oleh kelompok/individu (LSM, Buruh, Ormas, Organisasi Ekstra Kemahasiswaan, elit Parpol melakukan aksi unras dengan mengangkat issue permasalahan sosial di masyarakat, terutama masalah buruh, kasus agraria, penggusuran bangunan liar, penanganan kasus korupsi, kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas dan masalah kebijakan pemerintah.

f) Aspek .....

1. Aspek Ekonomi
2. kecenderungan ekonomi Jawa Timur kedepan, walaupun terjadi peningkatan secara signifikan dan perkembangan sektor industri manufaktur yang semakin pesat, namun masih dihadapkan dampak krisis ekonomi global dan fluktuasi harga minyak dunia yang disebabkan cadangan Migas semakin berkurang, turunnya nilai Rupiah terhadap $ AS;
3. target Pemprop Jawa Timur (Gubernur DR. Soekarwo) pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan ditingkatkan melalui investasi pada sektor industri manufaktur, kondisi ini dapat berakibat terjadinya konversi lahan pertanian yang pada gilirannya akan terjadi penurunan produk pertanian dan terjadinya urbanisasi;
4. upaya Kepala Daerah untuk meningkatkan PAD melalui investasi industri manufaktur/pendirian pabrik berdampak timbulnya potensi konflik antara buruh dengan kaum kapitalis/ pengusaha yang pada umumnya adalah para Taipan (WNI keturunan China), dan timbulnya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat serta meningkatnya urbanisasi, kecenderungan potensi gangguan akan meningkat pada saat mulai diberlakukannya perdagangan bebas dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean;
5. terjadinya ancaman krisis pangan sebagai akibat dari semakin meningkatnya harga kebutuhan pangan dunia, menurunnya produksi pangan nasional akibat adanya konversi/alih fungsi lahan, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk ditingkat petani sehingga petani bermigrasi ke kota untuk bekerja di sektor informal maupun formal, atau dampak musim pancaroba (kemarau panjang);

(5) sumber.....

1. sumber–sumber kekayaan/daya alam belum dapat di eksplorasi/di eksploitasi dengan maksimal oleh bangsa Indonesia melainkan dikelola asing dengan sistem Joint Ventura, akibatnya produk yang dihasilkan lebih banyak dikuasai oleh pihak asing (Migas di Bojonegoro dan Gresik), kondisi tersebut diatas sebagai akibat dari keterbatasan kualitas sumber daya manusia (un skill) dan sarana/prasarana yang tersedia. Kondisi inilah yang dimanfaatkan kelompok anti pemerintah, anti asing, untuk melakukan unjuk rasa menekan pemerintah dengan tuntutan agar pemerintah melakukan nasionalisasi atau melaksanakan Re–Contrak terhadap sumber–sumber daya alam yang dikelola asing;
2. dampak meningkatnya setiap tahun kenaikan BBM (solar dan premium) akan berpengaruh pada kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah, sektor nelayan, sektor transportasi dan lain lain, memicu naiknya harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat dan berdampak pada bentuk penyimpangan/ kejahatan;
3. penanganan dampak ekonomi dan dampak sosial terhadap warga dalam Peta Area Terdampak (PAT) Korban lumpur lapindo sudah berjalan sembilan (9) tahun sampai pergantian kepemimpinan nasional namun hingga saat ini belum tuntas dan menggunakan dana talangan APBN. Harapan warga PAT bertumpu pada pemerintahan JOKOWI-JK untuk dapat menuntaskan permasalahan tersebut, namun bila pemerintah belum juga dapat menyelesaikan maka masyarakat akan kecewa yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat korban lumpur Lapindo terhadap JOKOWI-JK, karena tidak sesuai dengan janji kampanye dan tetap menjadi persoalan belum dapat dihentikannya semburan lumpur tersebut dan dampak sosial baru yang akan ditimbulkannya serta sampai kapan menggunakan dana APBN .....

APBN tersebut yang dapat menghambat perekonomian disebabkan defisitnya keuangan negara;

1. sebelum peristiwa lumpur Lapindo, dilingkungan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi eksport maupun pemenuhan kebutuhan nasional dan lokal yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, namun karena peristiwa tersebut para pengusaha merugi dan tidak dapat membangun usaha baru di obyek lain karena belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sehingga menghambat perekonomian Jawa Timur dan Sidoarjo. GPKLL akan menuntut pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap aset perusahaan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kerugian materiel sebagai modal usaha untuk membangun usaha dan menyerap tenaga kerja yang dapat memajukan perekonomian negara;
2. pengembangan infrastruktur jalan (Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Mojokerto-Kertosono, Tol Mantingan/Ngawi-Kertosono, Tol Gempol-Pandaan dan Tol Pandaan-Malang serta Jalur Lintas Selatan) di wilayah Jawa Timur akan memberikan azas manfaat bagi masyarakat,

dan secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan distribusi barang/jasa, namun disisi lain dapat menimbulkan potensi korupsi dan unras warga yang menolak tanahnya terkena pembebasan terhadap lahan proyek karena perbedaan pandangan atas disparitas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan harga pasaran.

1. Aspek Sosial Budaya
2. kemajemukan adat istiadat, budaya, suku, ras, agama merupakan kekayaan bangsa dan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik apabila tidak

 dapat.....

dapat dikelola dengan baik dalam penanganannya oleh para stakeholder dalam mencari solusi-solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak;

1. pengaruh budaya asing/barat melalui media elektronik (media sosial/internet) yang menunjukkan kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis serta lemahnya regulasi dalam melakukan filterisasi terhadap pemberitaan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan jati diri masyarakat seperti perilaku menyimpang dari norma sosial, norma agama dan norma hukum yang berimplikasi terhadap degradasi moral terutama generasi muda yang masih labil karena masa transisi pencarian jati diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (Free Seks, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan fanatisme yang berlebihan terhadap suatu paham yang diperoleh dari kata ”JIHAD dan Khilafah”);

1. berkembangnya berbagai ajaran/faham/aliran kepercayaan atau agama melalui tehnologi informasi dan lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari jajaran Kemenag RI menimbulkan sikap pro kontra di dalam masyarakat, sehingga berpotensi terjadi konflik sosial, bahkan dapat menimbulkan konflik komunal ( konflik Sunni VS Syiah di Kab. Pasuruan, Kec. Puger kab, Jember dan Kab. Sampang, Kegiatan Majelis Tafsir Al Qur’an di Sidoarjo, Gresik, Ngawi dan Magetan);
2. diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada Desember 2015, dihadapkan masalah ketenagakerjaan dengan kualitas yang rendah/un skill, masuknya tenaga kerja asing akan terjadi persaingan antara TKA dengan tenaga kerja lokal, disparitas upah yang jauh dan implikasi terhadap perubahan budaya yang dibawa oleh orang asing terhadap masyarakat.

(5) berkembangnya.....

1. berkembangnya berbagai ajaran/faham/aliran kepercayaan atau agama melalui tehnologi informasi yang mudah diakses dari berbagai situs aplikasi via internet apabila Pemerintah tidak mengambil langkah filterisasi terhadap pengaruh pemberitaan negatif maka hal tersebut dapat memicu potensi konflik internal ataupun antar umat beragama (intoleransi), terlebih gerakan ISIS yang menggunakan tehnologi canggih dalam propagandanya mencari dukungan sebagai simpatisan dari mayoritas masyarakat Islam sehingga mempengaruhi mindset terhadap warga masyarakat untuk berperan aktif mendukung gerakan tersebut;
2. kelompok radikal yang berafiliasi dengan JAT ataupun ISIS akan terus melakukan upaya penyebaran paham dan rekruitmen anggota secara terselubung yang dikemas dalam berbagai kegiatan keagamaan, apabila upaya deradikalisasi oleh Pemerintah dan pelibatan tokoh agama yang masih bersifat parsial maka tidak akan efektif dalam membentengi masyarakat dari pengaruh kelompok radikal tersebut;
3. perkembangan ISIS/IS di Indonesia, khususnya di Jawa Timur semakin intensif dilakukan oleh kelompok JAT, hal ini terjadi karena Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang dapat menghentikan aktifitas kelompok radikal tersebut terkecuali melakukan tindak pidana umum ataupun terorisme;
4. kuantitas tenaga honorer baik guru tidak tetap dan paramedis yang belum diangkat sebagai PNS masih cukup tinggi, padahal tenaga honorer tersebut telah mengabdi cukup lama dan usia semakin lanjut sehingga menimbulkan beban psikologis bagi honorer tersebut dan kesejahteraan yang kurang memadai sehingga membandingkan dengan buruh,

apabila.....

apabila pemerintah tidak segera melakukan sertifikasi atau pengangkatan maka akan terus melakukan pressure kepada Pemerintah dengan melakukan aksi unjuk rasa atau mogok yang dapat berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan;

1. kepedulian kepala daerah terhadap lembaga pendidikan dirasakan masih sangat kurang dikarenakan masih adanya infrastruktur lembaga pendidikan yang kurang memadai sehingga pada saat musim penghujan atau tekanan angin mengalami kerusakan yang dapat menimbulkan korban luka terhadap siswa atau tenaga pengajar;
2. kebijakan pemerintahan terhadap pemberlakuan kurikulum pendidikan menimbulkan kebingungan terhadap peserta didik dan orangtua, demikian juga halnya sistem ujian nasional yang cederung selalu berubah;
3. dibidang kesehatan masih dihadapkan permasalahan disparitas pelayanan status kesehatan, pekerja medis/ paramedis berorientasi pada status ekonomi pasien bukan service oriented, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup higienis/bersih dan sehat, kurangnya pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan, mutu dan ketersediaan obat. Pelaksanaan BPJS masih banyak ditemukan permasalahan terutama adanya diskriminasi terhadap pasien tidak mampu serta pelayanan BPJS belum tersistem dengan baik;
4. permasalahan ketenagakerjaan/hubungan industrial terkait masalah UMK Propinsi/Kab/Kota, permasalahan Outsourching, PHK sepihak, banyaknya organisasi buruh yang berafiliasi ke Parpol sehingga memicu terjadinya aksi unras buruh dengan mendatangi Kantor/Lembaga Pemerintah, sweeping perusahaan lain dengan dalih aksi solidaritas, aksi tutup perusahaan, tutup Jalan, tuntutan secara hukum melalui Lembaga Perselisihan Perburuhan terutama di kawasan Surabaya Kota, Kab./Kota Mojokerto, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo dan Kab/Kota Pasuruan, kondisi tersebut telah dimanfaatkan oleh kelompok/individu tertentu untuk kepentingan politik ataupun untuk mata pencaharian (unras bayaran);
5. konflik tanah perkebunan (PTP), konflik hak penguasaan tanah/lahan antara masyarakat dengan Pihak TNI/Polri, belum tuntasnya penanganan dampak sosial dan ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo, penggusuran bangunan liar atau lahan yang diperuntukan proyek infrastruktur jalan (Jombang, Malang, Blitar, Kediri, Surabaya, Gresik);
6. 50 % kondisi hutan di Jatim mengalami kritis/gundul akibat illegal logging dan pembakaran/kebakaran hutan serta peralihan fungsi hutan konservasi menjadi hutan produksi berpotensi terjadinya bencana alam hidrologi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi dan rendahnya penyerapan air hujan tersebut oleh keberadaan hutan dan manfaatnya.
7. Aspek Keamanan
8. pasca tertembaknya beberapa tokoh teroris baik yang tertangkap hidup atau mati menunjukkan aksi-aksi teror di Indonesia cenderung turun, tertangkapnya jaringan JI di Indonesia dalam kondisi hidup telah membantu untuk mengungkap jaringan teror di Indonesia dan sebagian dari para pelaku cenderung tertutup sehingga ancaman teroris masih tetap ” Ada ”, karena kelompok teroris telah merubah cara atau pola operasi dan tetap melakukan rekruitmen melalui kegiatan dakwah dan pengajian guna menanamkan pengaruhnya terutama terhadap pemuda (18-22 tahun). Beberapa wilayah Jawa Timur telah

dijadikan....

dijadikan sebagai tempat rekruitmen,persembunyian, pelatihan dan transit;

1. terjadi peningkatan kualitas kasus curas/curat, curanmor dengan menggunakan senpi/handak rakitan untuk menyerang korban dengan sasaran nasabah bank, SPBU, pengendara ranmor, ATM, toko emas untuk memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan perubahan gaya hidup para pelaku serta tidak didukung oleh kemampuan atau keahlian lain atau tidak menutup kemungkinan terkait dengan aksi fa’i dari jaringan teroris untuk mendukung kegiatan operasional para pelaku teroris;
2. tahun 2019 terjadi peningkatan peredaran Narkoba di Jawa Timur yang diselundupkan melalui Bandara Juanda, kondisi ini menujukan bahwa di Jawa Timur telah dijadikan pasar peredaran narkoba, sehingga pada tahun 2020 diperkirakan kasus narkoba semakin meningkat. Perdagangan manusia terutama kaum wanita remaja atau dibawah umur, perkelahian remaja/pelajar, kasus seksual akan mewarnai pada tahun 2020, kondisi ini sebagai dampak dari pengangguran dan pengaruh budaya asing;
3. jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan infrastuktur jalan, dan munculnya ranmor modifikasi seperti becak motor, mesin penggiling padi serta kereta kelinci telah memicu terjadinya kepadatan lalu lintas terutama di jalan lintas utama dan dalam Kota yang berpotensi terjadi kemacetan serta meningkatnya laka lantas.

 2) Lokal.....

1. Lokal Kabupaten Tuban
2. Aspek ideologi

Bergesernya pengamalan nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbul upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu yang berupaya mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama dengan ditandai masih potensialnya kegiatan kelompok radikal, faham liberalis, faham sosialis / komunis. Munculnya penyebaran paham ISIS yang ingin mengembangkan kekhalifahan Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia;

1. Aspek Politik
	* + 1. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat rawan terjadinya ketidak patuhan hukum dengan melakukan aksi unjuk rasa atau pelanggaran/tindak pidana di Kab. Tuban.
			2. Masih potensialnya terjadi konflik kepentingan dalam wacana perpolitikan Indonesia yang masih belum sepenuhnya stabil.
2. Aspek ekonomi
	* + 1. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai tanggal 31 Desember 2015 akan menjadi pasar tunggal sehingga terjadi aliran bebas barang, jasa investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara Negara ASEAN;
			2. Berbagai permasalahan dan kebijakan ekonomi pemerintah selama tahun 2016 dan tahun 2017 yang dianggap tidak pro rakyat akan memunculkan kasus – kasus konflik dan timbulnya aksi solidaritas di masyarakat;

 (3)Pembangunan .....

* + - 1. Pembangunan pabrik semen PT. Holcim yang terletak di desa Sawir dan Merkawang Kec. Tambakboyo, Ds. Karangasem Kec. Jenu dan desa Mliwang Kec. Kerek Kab.Tuban yang akan berdampak pada masalah perekrutan tenaga kerja, masalah lingkungan pemukiman dan polusi yang ditimbulkan;
			2. perluasan pabrik semen Gresik Tuban IV yang terletak di Ds. Sumberarum Kec. Kerek Kab. Tuban yang akan berdampak pada masalah perekrutan tenaga kerja, masalah lingkungan pemukiman dan polusi yang ditimbulkan.
			3. perluasan area tambang PT. Semen Gresik di wilayah RPH Merakurak di Kec. Merakurak ditentang oleh warga Ds. Tuwiri Wetan, Ds. Kapu, Ds. Tahulu, Ds. Tegal rejo Kec. Merakurak Kab. Tuban, yang telah beberapa kali melakukan aksi unras di Pemda, DPRD Kab. Tuban dan perhutani, namun sampai saat ini masih belum ada kesepakatan.
			4. pembangunan kilang minyak oleh PT. Pertamina di Ds. Remen Kec. Jenu Kab. Tuban yang akan berdampak pada masalah perekrutan tenaga kerja, masalah pembebasan tanah dan masalah lingkungan (limbah yang ditimbulkan);
			5. Pembangunan proyek PLTU di Ds. Wadung Kec. Jenu akan berdampak pada masalah perekrutan tenaga kerja.
1. Aspek Sosbud
2. Tranformasi budaya yang terlalu bebas telah mendorong naiknya angka kriminalitas antara lain narkoba, kenakalan remaja, prostitusi, Curat, Curanmor, Curas dan perampasan di atas kendaraan.

(2)Perekrutan.....

1. Perekrutan tenaga kerja di beberapa perusahaan di wilayah Kab. Tuban yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga

menimbulkan rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang mengakibatkan terjadinya gejolak di masyarakat yang akhirnya mengarah pada gerakan aksi unras.

1. Keberadaan hiburan malam yang identik dengan peredaran Narkoba, Miras dan tempat praktek prostitusi terselubung, telah menimbulkan antipati dari kelompok masyarakat Islam radikal karena dianggap bahwa tempat tersebut merupakan ajang praktek kemaksiatan yang bertentangan dengan ajaran agama.
2. Aspek agama
3. Pendirian dan pembangunan tempat pembinaan umat Kristen yang belum memiliki legalitas dari warga maupun pemerintah seringkali menimbulkan masalah, karena keberadaannya ditolak oleh muslim sekitar, kondisi seperti ini rawan terjadi konflik horizontal yang bernuansa Sara.
4. Pelaksanaan haul Sonan Bonang yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya yang menarik pengunjung para peziarah dari berbagai propinsi di Indonesia adalah kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam keamanannya.
5. Aspek Keamanan
6. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, akibat terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

(2)Ringannya.....

1. Ringannya vonis hakim yang dijatuhkan kepada para terdakwa pelaku kejahatan, tidak menimbulkan efek jera serta lemahnya pengawasan dan pembinaan selama dalam menjalani hukuman di Lapas sehingga mendorong mengulangi perbuatannya ketika mereka sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. **Analisis**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Tuban dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisis dari faktor – faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa, yaitu :

1. Kekuatan
2. Meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun dan telah dapat memenuhi kebutuhan operasional Polres Tuban terutama dalam kegiatan operasional dan pemenuhan alat-alat khusus dalam menunjang kegiatan/operasional Polres Tuban.
3. Meningkatnya kemampuan fungsi operasional dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal mining), kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa), kejahatan *transnational crime* (terorisme narkoba) dan kejahatan konvensional (jiwa, harta benda, dan kehormatan) sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Tuban.
4. Terpenuhinya jabatan dan unit-unit baru berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek akan semakin meningkatkan pelayanan Polres Tuban kepada masyarakat.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang terpenuhi tentang kebutuhan penambahan fasilitas Polsek serta terdukungnya pembangunan fasilitas guna kelancaran pelayanan Polres Tuban ke masyarakat.

 e)Tunjangan.....

1. Tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri Polres Tuban sebagai dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
2. Kelemahan
3. Masih kurangnya personel di lapangan khususnya di Polsek-Polsek sehingga jika terjadi laka lantas di Polsek penangannya masih ditangani oleh Sat Lantas Polres dalam menghadapi kuantitas kecelakaan yang tinggi. Serta perlunya pelatihan Penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas, olah TKP dan TP TKP Laka Lantas terhadap Anggota Unit Laka.
4. Masih terbatasnya kemampuan dan profesional para penyidik lakalantas, berdampak pada kecepatan penyelesaian perkara dan belum sepenuhnya memanfaatkan kerjasama dengan instansi terkait agar transparan, cepat dan tepat sesuai yang diharapkan.
5. Kuantitas personel Polres Tuban belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai dengan standar kompetensi dan Mind Set and Culture dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.
6. Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1:595) belum ideal dapat dipenuhi. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban saat ini 1.172.790 jiwa.
7. Peluang
8. Pengelolaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional antara lain kondisi geografis, demografis dan sumber daya alam menjadi peluang dalam menunjang kepentingan nasional.
9. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan

dinamis.....

dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBK) menyediakan peluang bagi Polres Tuban untuk melanjutkan reformasi birokrasi baik dalam aspek struktural, instrumental, maupun kultural.

1. Reformasi kultural yang telah menunjukkan kemajuan di Polres Tuban dalam menghapus paradigma lama dalam melayani masyarakat. Sehingga, optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima dapat terus dilakukan melalui penggelaran personel dan peralatan Polres Tuban berbasis teknologi.
2. Membenahi manajemen SDM guna peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
3. Peran Bidang Kehumasan dalam memberikan penerangan tentang agenda pembangunan kepada masyarakat melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat.
4. Proses rekruitmen maupun pergeseran personel hasil Dikbang atau mutasi yang berkualitas sehingga tercipta postur Polri yang diharapkan guna memberikan sebaran pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Pemanfaatan teknologi berbasis e-manajemen dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Sehingga data bisa dilaporkan secara terpadu dan pimpinan bisa mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masing masing penyidik.
6. Cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berpeluang untuk ditingkatkan.
7. Ancaman
8. Konflik yang dapat muncul selama masa darurat yang terjadi karena wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) antara lain upaya pemblokiran akses jalan sehingga menimbulkan kericuhan, seperti penjarahan, penodongan, pemalakan atau

 Kriminalitas.....

kriminalitas sejenisnya, yang berpotensi menghambat akses kendaraan logistik pangan dan medis, serta penolakan pemakaman dan perebutan jenazah Covid 19.

1. Adanya dimensi baru dalam penyebaran kejahatan-kejahatan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak negatif seperti kejahatan siber. Dalam era virtual saat ini baik kejahatan terhadap sistem informasi (*computer crime*) maupun kejahatan lama yang akan lebih mudah dilakukan dengan teknologi informasi (*computer related crime*). Hal tersebut dapat berkontribusi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.
2. Gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat di perairan. Potensi perairan Kabupaten Tuban yang luas belum sepenuhnya dapat dijaga secara maksimal akibatnya membuka peluang terjadinya pelanggaran.
3. Keberagaman pelanggaran di perairan dimana tidak hanya pada persoalan *illegal fishing*, berkembang menjadi pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, ketidaklengkapan dokumen perizinan penangkapan, tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi. Pelanggaran terus meluas ke human trafficking, pasokan dan peredaran Narkoba, pasokan dan distribusi senjata untuk kepentingan kejahatan.
4. **Identifikasi masalah.**

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polres Tuban, antara lain :

1. Perlu peningkatan pengembangan kekuatan personil Polri terutama diwilayah Polsek Jajaran Polres Tuban untuk menanggulangi kejahatan yang sering terjadi secara profesional.
2. Bhabinkamtibmas di Polsek, dalam melaksanakan tugas sebagai basis deteksi dini dan problem solving, masih melaksanakan tugas di beberapa Desa, yang harusnya ideal 1 Desa dipegang 1 Bhabinkamtibmas, selain itu masih merangkap tugas operasional, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat hasil yang dicapai kurang optimal;
3. Terbatasnya personel Polsek dengan distribusi yang belum merata dan belum sesuai DSP.
4. Masih dijumpai perilaku anggota yang kurang terpuji / tidak reformis dilapangan.

**BAB II**

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. **Visi dan Misi**
2. **Visi dan Misi Polda Jatim**
3. Visi

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polda Jatim “.

Makna : Visi Polda Jatim:

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jatim

1. Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jatim.”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan..

1. **Visi dan Misi Polres Tuban**.
2. Visi

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polres Tuban.”

Makna Visi Polres Tuban:

Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Tuban.

2) Misi.....

1. Misi

” melindungi, mengayomi, melayani dan penegakkan hukum”

1. melindungi : “ anggota Polres Tuban memiliki kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga merasa tenteram dan damai tanpa perbedaan perlakuan ”;
2. mengayomi :“ anggota Polres Tuban wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, pesan, ajakan, dan nasehat yang bermanfaat bagi masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram“;
3. melayani : “ anggota Polres Tuban melayani masyarakat dengan mudah, cepat, bermoral, simpatik, ramah dan sopan”.
4. **Tujuan Jangka Menengah**.
5. **Tujuan Jangka Menengah Polda Jatim**
6. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jatim.
7. Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur.
8. Mewujudkan SDM Polda Jatim yang profesional.
9. Modernisasi pelayanan Polda Jatim.
10. Menerapkan manajemen Polda Jatim yang terintegrasi dan terpercaya
11. **Tujuan Jangka Menengah Polres Tuban**
12. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Tuban.
13. Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tuban.
14. Mewujudkan SDM Polres Tuban yang profesional.
15. Modernisasi pelayanan Polres Tuban.

5) Menerapkan.....

1. Menerapkan manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya.
2. **Sasaran Prioritas**
3. **Sasaran Prioritas Polda Jatim**

Sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
	2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.
	3. Profesionalisme SDM Polda Jatim.
	4. Modernisasi Teknologi Polda Jatim.
	5. Sistem pengawasan Polda Jatim yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani;
1. **Sasaran prioritas Polres Tuban**

Sasaran prioritas Polres Tuban Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.
3. Profesionalisme SDM Polres Tuban.
4. Modernisasi Teknologi Polres Tuban.
5. Sistem pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

**BAB III .....**

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN POLDA JATIM DAN POLRES TUBAN** **TAHUN 2022**

1. **Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2022.**
	1. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Jawa Timur”, yaitu :
	2. Pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat ;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

* 1. Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi aksi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kemamanan dan ketertiban masyarakat lainnya;
	2. Mengoptimalisasikan pengamanan area perairan serta dirgantara daerah hukum Polda Jawa Timur berbasis teknologi;
	3. Mengoptimalisasikan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya;
	4. Mengoptimalisasikan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya;
	5. Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
	6. Pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Meningkatkan proses literasi digital dan manajemen media sosial;

Menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;

* 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas;

Untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

* + 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas;
		2. Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Jawa Timur;
		3. Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor;
		4. Memberantasan penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
	1. Penghentian konflik antar warga dengan melibatkan peran masyarakat dan komunitas (Community Policing);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

1. Memberdayakan masyarakat melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Mengoptimalisasi edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan pembinaan polisi khusus pada lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus.
	1. Penjagaan terhadap kestabilan keamanan masyarakat.;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Jawa Timur (Kecamatan dan Kelurahan);
2. Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil;

6) Pemberantasan.....

* 1. Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polda Jawa Timur;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba;
2. Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba;
3. Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat.
4. Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum para penjahat NAPZA;
5. Meningkatkan proses menemukenali modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba
6. Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah
	1. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.”,yaitu:
7. Peningkatan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait di dalam dan di luar Negeri;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Mengintegrasikan.....

1. Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polri dan aparat penegak hukum;
2. Standardisasi data kriminal nasional;
3. Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.
	1. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Profesionalisme SDM Polda Jawa Timur.” yaitu:
	2. Peningkatan kualitas SDM di Polda Jawa Timur;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana;
2. Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polri;
3. Menyelenggarakan sistem *reward and punishment* kepada personel Polda Jawa Timur secara objektif;
	1. Peningkatan kompetensi SDM di Polda Jawa Timur; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
4. Meningkatkan jumlah SDM Polda Jawa Timur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
	1. Menyediakan data dan informasi berbasis media yang *user friendly*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jatim yang akan dilakukan:
5. Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses;
6. Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) Memperkuat.....

1. Memperkuat pengelolaan data operasional Kepolisian Daerah dalam satu sistem pengelolaan data terpusat;
	1. Menyediakan sarana dan prasarana Polda yang modern dan berbasis teknologi terkini;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan tekhnologi terkini;
4. Membangun *Big Data/Single Data Entry*
5. Meningkatkan akses informasi yang akurat;
6. Meningkatkan sistem penanganan masalah;
7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik;
	1. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Sistem Pengawasan Polda Jawa Timur yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan melayani.”,yaitu:
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda;
2. Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polda dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan data dan informasi nasional;
4. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Meningkatkan.....

1. Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisen;
3. Mengoptimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP);

1. Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polda;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polda;
2. Meningkatkan manajemen kinerja Polda;
3. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda yang andal;
4. Memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas;
5. dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
6. Monitoring dan evaluasi tata laksana Polda Jatim;
7. Penataan organisasi tingkat Polda;
8. Penataan organisasi tingkat Polsek /Polsubsektor;
9. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri;
10. Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
11. Penguatan regulasi;
12. Penanganan *public complaint* secara efektif dan terpercaya;
13. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Polda Jawa Timur

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis TIK;
2. Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date;*

d) Meningkatkan.....

1. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan;
2. **Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tuban**
3. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tuban”, yaitu:
4. Pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

1. Memetakan potensi aksi terorisme, radikalisme, konflik social dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya;
2. Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi aksi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kemamanan dan ketertiban masyarakat lainnya;
3. Mengoptimalisasikan pengamanan area perairan daerah hukum Polres Tuban berbasis teknologi;
4. Mengoptimalisasikan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya;
5. Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan Kabupaten Tuban;
6. Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat;
7. Pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan proses literasi digital dan manajemen media sosial;
2. Menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;

3) Peningkatan.....

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas;
3. Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Kabupaten Tuban;
4. Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor;
5. Memberantasan penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
6. Penghentian konflik antar warga dengan melibatkan peran masyarakat dan komunitas (*Community Policing*);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

1. Memberdayakan masyarakat melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Mengoptimalisasi edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
5. Meningkatkan pembinaan polisi khusus pada lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus.

1. Penjagaan terhadap kestabilan keamanan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Tuban (Kecamatan dan Kelurahan);
2. Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang

c) lingkup.....

1. lingkup pemerintahan terkecil;
2. Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Tuban;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba;
2. Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba;
3. Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat;
4. Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum para penjahat NAPZA;
5. Meningkatkan proses mengenali modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba;
6. Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten Tuban;
7. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ”Penegakan Hukum Secara Berkeadilan”, yaitu
8. Peningkatan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Kabupaten (SPPT-TI).

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Mengintegrasikan....

1. Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker dan aparat penegak hukum;
2. Standardisasi data kriminal Kabupaten;
3. Mengembangkan sistem informasi kriminal Kabupaten yang terintegrasi;
4. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Profesionalisme SDM Polres Tuban”,yaitu:
5. Peningkatan kualitas SDM di Polres Tuban;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana;
2. Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polres Tuban;
3. Menyelenggarakan sistem *reward and punishment* kepada personel Polres Tuban secara objektif;
4. Peningkatan kompetensi SDM di Polres Tuban;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan jumlah SDM Polres Tuban yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
2. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Modernisasi Teknologi Polres Tuban”,yaitu:
3. Menyediakan data dan informasi berbasis media yang *user friendly*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses;

b) Mengelola.....

1. Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Memperkuat pengelolaan data operasional dalam satu sistem pengelolaan data terpusat;
3. Menyediakan sarana dan prasarana Polres yang modern dan berbasis teknologi terkini;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

1. Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan tekhnologi terkini;
4. Membangun *Big Data/Single Data Entry*.
5. Meningkatkan akses informasi yang akurat;
6. Meningkatkan sistem penanganan masalah;
7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan public;
8. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Sistem Pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan melayani”,yaitu:
9. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Tuban;
2. Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polres dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan data dan informasi;
4. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Meningkatkan.....

1. Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisen.
3. Mengoptimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)
4. Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polres; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
5. Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
6. Meningkatkan manajemen kinerja Polri;
7. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
8. Memantapkan secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
9. Monitoring dan evaluasi tata laksana Polres Tuban;
10. Penataan organisasi tingkat Polres;
11. Penataan organisasi tingkat Polsek;
12. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri.
13. Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
	* 1. Penguatan regulasi;
		2. Penanganan *public complaint* secara efektif dan terpercaya;
14. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Polres Tuban; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
15. Meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis TIK;
16. Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;

Peningkatan.....

1. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date;*
2. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan.

**BAB IV** .....

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF**

1. **Program dan kegiatan**
2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana,
3. tujuan :

Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi

1. sasaran :
2. persentase pengungkapan tindak pidana konvensional;
3. persentase pengungkapan tindak pidana transnasional;
4. persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayan Negara;
5. persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi
6. kegiatan:
7. Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
8. Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
9. penindakan tindak pidana umum;
10. penindakan tindak pidana Narkoba;
11. penindakan tindak pidana korupsi;
12. penindakan tindak pidana Lalu Lintas.
13. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
14. Tujuan :

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil,

fasilitas.....

fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kualitas.

1. sasaran :

persentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi estándar pelayanan Kamtibmas prima.

1. kegiatan :
* Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras;
1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. tujuan :

memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ke-tertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Kab. Tuban dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.

1. sasaran :
2. jumlah kriminalitas yang dapat di tindak oleh fungsi Sabhara, Polair, Binmas, Pamobvit;
3. jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya;
4. jumlah patrol perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI;
5. jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP;
6. jumlah pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemilihan Presiden/Wakil, Legislatif baik tingkat pusat maupun daerah.
7. kegiatan :

a) Analisis.....

1. Analisis Keamanan;
2. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
3. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
4. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;
5. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
7. Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
8. Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
9. Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;
10. Pembinaan Potensi Keamanan;
11. Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan;
12. Pengendalian Operasi Kepolisian;
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdiri dari kegiatan :
14. tujuan :

menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polres dan Polsek Jajaran.

1. sasaran :
2. jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis;
3. persentase kebijakan yang berpihak pada masyarakat;

c) persentase.....

1. persentase perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu;
2. persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
3. persentase unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel;
4. persentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal;
5. persentase kecukupan operasional pelaksanan tugas pelayanan internal.
6. Kegiatan :
7. Penerangan Masyarakat;
8. Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
9. Pertanggung jawaban Profesi;
10. Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
11. Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri;
12. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan;
13. Kersama dan Penyuluhan Hukum;
14. ManajemenAnggaran;
15. Reformasi Birokrasi Polri;
16. **Usulan Pagu Indikatif**

Alokasi Pagu Indikatif Polres Tuban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 91.208.459.000,- (Sembilan puluh satu milyar dua ratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 3.594.408.000,- meliputi;
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 13.163.000,-;
3. Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 24.805.000,-;
4. penindakan tindak pidana umum Rp. 2.065.477.000,-;

4) penindakan.....

1. penindakan tindak pidana Narkoba Rp. 518.558.000,-;
2. penindakan tindak pidana korupsi Rp. 640.000.000,-;
3. penindakan tindak pidana Lalu Lintas Rp. 332.405.000,-;.
4. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 6.638.423.000,- meliputi :
5. Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Rp. 2.052.620.000,-
6. Program Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 12.500.141.000,- meliputi :
7. Analisis Keamanan Rp. 23.760.000,-;
8. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik Rp. 191.671.000,-;
9. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi Rp. 135.160.000,-;
10. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp. 316.619.000,-;
11. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp. 552.380.000,-;
12. Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 3.439.624.000,-;
13. Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Rp. 1.151.650.000,-;
14. Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Rp. 930.186.000,,-;
15. Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Rp. 1.205.003.000,-;
16. Pembinaan Potensi Keamanan Rp. 3.936.110.000,-;
17. Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan Rp. 93.478.000,- ;
18. Pengendalian Operasi Kepolisian Rp. 710.207.000,-;
19. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 68.475.487.000,- meliputi :
20. Penerangan Masyarakat Rp. 178.860.000,-
21. Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 68.161.980.000,-;
22. Pertanggung jawaban Profesi Rp. 11.423.000,-
23. Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp. 12.392.000,-;
24. Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri Rp. 13.860.000,,- ;

6) Penyelenggaraan.....

1. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Rp. 30.000.000,-;
2. Kersama dan Penyuluhan Hukum Rp. 20.000.000,-
3. Reformasi Birokrasi Polri Rp. 36.684.000,-
4. Manajemen Anggaran Rp. 10.552.000,-

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Tuban tahun 2022, untuk dijadikan sebagai usulan Pagu Indikatif TA. 2022 serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Polres Tuban TA. 2022.

Ditetapkan di : Tuban

Pada Tanggal : 4 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

RURUH WICAKSONO, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78090891

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES TUBAN TA. 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET TH 2022 | KET |
|  |  |  |  |  |  |
| I. | Keamanan dan Ketertiban Kabupaten |  | Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten | 3,37 |  |
| 1. | Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |  | Indeks Harkamtibmas Polres Tuban | 72,11 |  |
| 2. | Penegakkan Hukum secara Berkeadilan |  | Indeks Gakkum Polres Tuban  | 69,29 |  |
| 3. | Profesionalisme SDM Polres Tuban |  | Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban | 44 |  |
| 4. | Modernisasi Teknologi Polres Tuban | a. | Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data | 74 |  |
| b. | Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan almatsus polri | 68% |  |
| c. | Persentase Counter Opini Negatif | 62% |  |
| 5. | Terujudnya tata kelola Polres Tuban yang bersih, terbuka dan melayani | a. | Nilai AKIP | 68,97 |  |
| b. | Nilai RBP | 81,46 |  |
| c. | Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban | 97,42 |  |
| d. | Nilai Kinerja Anggaran | 97,92 |  |
| e. | Persentase Penanganan pengaduan masyarakat | 75,3% |  |
| f. | Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum | 60,4% |  |

Tuban, 4 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

RURUH WICAKSONO, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78090891